

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Desa sebagai unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah. Kegagalan program di tingkat desa akan membawa dampak bagi kegagalan program pemerintahan di atasnya.

Pada dasarnya program-program pemerintah merupakan penjabaran dari tujuan Nasional yang hendak dicapai oleh pemerintah Republik Indonesia. Tujuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang berbunyi :

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

Untuk mewujudkan tujuan pemerintah Republik Indonesia tersebut, tidak dapat dilaksanakan secara cepat tetapi dilaksanakan secara bertahap, terus menerus, menyeluruh, terarah, terpadu dan berencana. Pada prinsipnya

1. Tujuan adalah untuk melindungi kemerdekaan bagi seluruh

Apabila pembangunan nasional digambarkan sebagai suatu lingkaran maka titik pusat dari lingkaran tersebut adalah pembangunan pedesaan. Ini didasarkan atas beberapa alasan :

*Pertama*, bahwa kurang lebih 80% penduduk berdiam di pedesaan sehingga apabila pembangunan nasional itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pembangunan termaksud harus melibatkan secara langsung atau tidak langsung 80% penduduk pedesaan tersebut. Dibanding dengan penduduk perkotaan, tingkat hidup masyarakat pedesaan relatif rendah. Dan dilihat dari aspek rasa keadilan sosial, maka pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan perlu mendapat perhatian dan prioritas tinggi.

*Kedua*, potensi sumber daya alam sebagian besar terdapat di daerah pedesaan yang berupa lahan pertanian, sumber air, hutan dan tenaga kerja. Dengan alasan itulah penggalan sumber alam di atas mau tidak mau memerlukan adanya pembangunan.

*Ketiga*, dilihat dari sudut pertahanan keamanan terletak di desa. Peningkatan daya tahan desa mengharuskan pembangunan desa dan pedesaan perlu memperoleh perhatian istimewa. Meskipun telah disadari urgensi pembangunan pedesaan dalam konteks pembangunan nasional, akan tetapi pembangunan pedesaan tidak dapat dipicu seirama dengan laju pembangunan di sektor- sektor lain.<sup>1</sup>

Selain telah dijelaskan di atas tentang tujuan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan pula tujuan pembangunan masyarakat Indonesia,

sebagai sub sistem dari sistem pembangunan nasional sesuai dengan jiwa pasal 18 UUD 1945 maka pembangunan masyarakat desa bertujuan :<sup>2</sup>

### 1. Tujuan umum

Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, melalui kebijakan pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya ke seluruh wilayah tanah air.

### 2. Tujuan Khusus

- Mengadakan perubahan dan pembaharuan secara terarah terhadap kondisi kehidupan material dan spiritual masyarakat desa.
- Mengembangkan wilayah desa sebagai satuan potensi ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, menuju tercapainya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagai pemeran dan sekaligus tujuan pembangunan.
- Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat desa menuju terwujudnya daya cipta dan karya masyarakat desa dalam pembangunan.
- Memupuk dan membina kestabilan kehidupan masyarakat desa sebagai landasan penciptaan kestabilan nasional.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar mampu mengelola proses pembangunan secara mandiri (self- sustaining process)

Dalam GBHN 1993 telah dituliskan bahwa titik berat pembangunan jangka panjang (PJP) diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia

atau sekitar 1,7% pertahun. Angka ini berarti jauh lebih besar bila dibanding dengan angka pertambahan penduduk yang besarnya sekitar 1,08% pertahun.<sup>3</sup>

Sebagai contoh keberhasilan pembangunan di Indonesia dalam bidang sosial ekonomi adalah keberhasilan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Keberhasilan tersebut tidak semata-mata karena campur tangan pemerintah saja akan tetapi juga karena peran aktif dari masyarakatnya.

Hal ini dapat digambarkan dari hasil swadaya masyarakat yang dalam 5 tahun terakhir s/d tahun 1995/ 1996 mencapai 18.567 milyar rupiah untuk membiayai pengaspalan jalan desa sepanjang 416 km, pembangunan balai banjar sebanyak 337 buah, P4 swadaya sebanyak 10.449 orang, serta kegiatan lainnya. Hasil pendataan Keluarga Sejahtera menunjukkan peningkatan yang sangat mengembirakan dimana di Kabupaten Badung yang pada tahun 1994 terdapat 424 KK pra-KS telah dapat ditanggulangi dan sejak 11 agustus 1995 dinyatakan bebas pra- KS.<sup>4</sup>

Jika kita simak kembali masalah- masalah lama ternyata cukup banyak yang masih perlu dibenahi. Terlebih- lebih yang menyangkut pembangunan di pedesaan yakni :<sup>5</sup>

#### 1. Kemiskinan Pedesaan

Kemiskinan pedesaan (*rural poverty*), merupakan salah satu topik pokok yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan pertanian dan pedesaan,

---

<sup>3</sup> Soekartawi, *Strategi Mengentas Kemiskinan di Indonesia melalui Inpres Desa*

terlebih di negara- negara sedang berkembang yang sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pedesaan, yang umumnya dalam belunggu kemiskinan, dengan pertanian sebagai basis ekonominya.

## 2. Kesempatan Kerja

Kiranya tidak dapat dibantah lagi bahwa kesempatan kerja merupakan masalah penting. Pertambahan angkatan kerja yang cepatpun membawa dampak bagi pengangguran. Dalam kaitan ini, sektor pedesaan dengan sifat ekonominya yang belum terlalu komersial finansial dapat dihadapkan mampu mengurangi beban ledakan tersebut dengan menampung sebagian pencari kerja.

Urbanisasi misalnya, merupakan salah satu dampak negatif terjadinya ledakan angkatan kerja di pedesaan. Daya serap perekonomian desa memang terbatas. Dengan terbatasnya kesempatan kerja di pedesaan, ditambah meningkatnya mobilitas penduduk, mendorong terjadinya proses urbanisasi tersebut. Implikasinya salah satu yang jelas, apabila sektor pedesaan dan pertanian diharapkan mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja adalah adanya keharusan pemerintah untuk menambah basis ekonomi desa.

## 3. Sifat Hubungan Impersonal

Proses pembangunan dengan segala aspek kemodernannya, telah membawa sifat hubungan ekonomi dan sosial yang semula bersifat informal non-komersial menjadi formal komersial. Transaksi yang semula dilakukan secara barter menjadi bercorak finansial. Hubungan ekonomi yang demikian itu

pada akhirnya secara cermat mengikatkan diri pada bentuk ikatan hubungan yang semakin kompleks. Lebih pasti hak dan kewajibannya, menuju ke sifat hubungan impersonal.

Implikasi dari makna formal komersialnya hubungan ekonomi di pedesaan, dan yang sekaligus merupakan tantangan pembangunan adalah bagaimana mempersiapkan para petani dalam menghadapi transaksi yang impersonal tadi. Barangkali pendidikan dan penyuluhan mengenai ekonomi kerumahtanggaan, keuangan dan sejenisnya merupakan beberapa beberapa bentuk alternatif usaha yang perlu dipikirkan.

#### 4. Intervensi Kebijakan Pemerintah

Pada intinya basis bagi pelaksanaan pembangunan pedesaan meliputi dua hal. Yang pertama, sumber alam yang tersedia, dan yang kedua sumber daya manusia yang akan memanfaatkan sumber alam tersebut. sumber alam memberikan basis ekonomi yang nantinya dapat diolah dan dikembangkan. Sumber daya manusia tentunya akan mempengaruhi cara dan intensitas pemanfaatan sumber alam yang tersedia tadi.

Kedua sumber daya ini tentunya kondisinya tidak sama antar daerah dan tidak selamanya mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia secara tertus-menerus. Karena itulah kiranya perlunya dilakukan intervensi kebijakan pemerintah, baik yang ditujukan kepada sumber alamnya maupun manusianya.

Meskipun intervensi tersebut nantinya mampu meningkatkan volume kegiatan dan produksi, tidak ada jaminan bahwa secara otomatis kesejahteraan

masyarakat akan meningkat. Untuk itu diperlukan bentuk kebijakan lain misalnya yang berupa kebijakan harga (seperti yang selama ini telah dikembangkan), pemasaran dan penyediaan berbagai sarana produksi dan peminjaman modal untuk usaha lain dan pengembangan usaha.

Proses pembangunan memang membawa konsekuensi- konsekuensi tertentu bagi sektor pedesaan. Konsekuensi demikian ini dapat dipandang sebagai problem sekaligus tantangan pembangunan pedesaan terlebih sekarang ini untuk memasuki pasar bebas. Tantangan- tantangan itu pasti akan selalu berubah, baik dilihat dari segi intensitasnya maupun dimensi masalahnya yang kesemuanya perlu dicarikan jalan keluarnya.

Bagaimanapun juga usaha pemerintah akan sia- sia dalam pelaksanaan pencapaian tujuan, tanpa kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan sosial ekonomi masyarakat tersebut karena hal itu merupakan hal yang paling penting. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan :

“ Mekanisme pembangunan desa adalah merupakan kerjasama yang serasi antara kegiatan pemerintah di lain pihak dan partisipasi masyarakat di pihak lain. Bahkan pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan pengawasan yang terarah, terkoordinasi agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.”<sup>6</sup>

Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat RI pada tahun 1974 dan dijabarkan dalam bentuk 10 komponen yang antara lain adalah :<sup>7</sup>

1. Kependudukan termasuk Keluarga Berencana dan Transmigrasi
2. Kesehatan
3. Gizi
4. Tenaga Kerja dan Koperasi
5. Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kesejahteraan Sosial
7. Perumahan
8. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
9. Agama
10. Umum

Efektivitas dalam pembangunan desa yang lebih berhasil guna dan berdaya guna berarti tercapainya tujuan pembangunan desa yang dikehendaki sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan juga bahwa hasil- hasil pembangunan yang dicapai saat sekarang harus setingkat lebih maju dan meningkat dari tahun ke tahun.

Efektivitas pembangunan desa dapat tercapai, apabila di dalam menentukan program- program pembangunan harus serealistis mungkin dan dapat dilaksanakan. Untuk itu dalam pembuatan program pembangunan harus benar- benar mempertimbangkan keadaan wilayahnya, kemampuan untuk melaksanakan

dan juga alokasi waktu yang tepat, dengan demikian tujuan pembangunan desa akan dapat dicapai. Efektivitas pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan atau hasil yang dicapai melalui pelaksanaan pembangunan yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian hasil yang dicapai dalam pembangunan harus mampu membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera adil dan merata pada segala segi kehidupan dan seluruh lapisan masyarakat merupakan wujud proses pembangunan desa yang efektif.

Suatu pembangunan di pedesaan khususnya dalam bidang sosial ekonomi dikatakan berhasil, tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyediakan jalan mulus dan jembatan yang kokoh, tetapi juga harus diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menumbuhkan kemauan dan kemampuan masyarakat desa itu untuk mandiri.

Artinya kemauan dan kemampuan masyarakat desa untuk menciptakan pembangunan dalam bidang sosial ekonomi dan menyelesaikan serta mengembangkan hasil- hasil pembangunan baik yang berasal dari usaha sendiri maupun berupa prakarsa yang datang dari luar masyarakat desa itu.

Melihat uraian di atas dapat diasumsikan bahwa efektivitas pembangunan desa itu dipengaruhi oleh banyak faktor baik intern maupun ekstern. Seperti misalnya pada kondisi fisik lokasi, budaya lokal, pendidikan masyarakat,

Banyak dan bervariasinya faktor tersebut di atas sangat mempengaruhi efektivitas pembangunan desa yang dilakukan. Dalam penelitian ini berhubung terbatasnya waktu, dana dan pengalaman penulis, maka penulis membatasi pada scope sejauh mana kemajuan dalam bidang sosial ekonomi (meliputi peningkatan pendapatan dan usaha masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat serta Keluarga Berencana, pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak) dalam masyarakat desa dapat tercapai melalui pembangunan dengan program- program yang telah dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2003.

Penulis merasa perlu meneliti hal tersebut karena berdasarkan kenyataan yang ada di Desa Jebengsari masih banyak terdapat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan atau masyarakat Pra keluarga Sejahtera.

Pembangunan Desa Jebengsari dalam bidang sosial ekonomi selama ini kurang berhasil karena dana bantuan pembangunan yang disalurkan kepada masyarakat tidak digunakan oleh masyarakat yang menerimanya sebagai mana mestinya yang menjadi tujuan pembangunan tersebut. Walaupun penyaluran dana bantuan sudah tepat sasaran.

## **B . Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat persoalan yang menuntut adanya pembahasan yang lebih lanjut. Adapun

Menurut Koentjoroningrat, definisi teori adalah :

“Teori sebagai kerangka penelitian disamping merupakan suatu kesimpulan induktif yang menggeneralisasi hubungan antara fakta- fakta atau kelas- kelas fakta, suatu teori yang telah matang juga dapat berfungsi sebagai pendorong proses berfikir deduktif yang bergerak dari abstrak ke fakta kongrit. Didalam hal ini suatu teori dipakai oleh peneliti sebagai kerangka yang memberi batasan kepadanya terhadap fakta- fakta yang kongrit yang tak terbilang banyaknya dalam kenyataan kehidupan masyarakat yang harus diperhitungkan.”<sup>8</sup>

Sehubungan dengan penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang melandasi, terutama yang ada hubungannya dengan materi penelitian.

## 1. Efektivitas Pembangunan Desa

### a. Efektivitas

Setiap organisasi baik formal maupun nonformal menghendaki tujuannya dapat tercapai secara efektif. Efektivitas secara umum mempunyai pengertian sebagai berikut :

“Efektivitas berasal dari kata efek atau aktivitas yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien juga berarti efektif. Karena dilihat dari segi hasil, tujuan dan akibat yang dikehendaki dengan perbuatan ialah tercapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlah). Sebaliknya dilihat dari segi usaha bahwa efek yang dihasilkan tidak tercapai bahkan dengan unsur usaha secara maksimal. Setiap pekerjaan efektif belum tentu efisien karena hasil memungkinkan dapat dicapai tetapi dengan penghimpunan materiil berupa pekerjaan dan benda.”<sup>9</sup>

Ada pendapat lain juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah bila suatu sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan yang

---

<sup>8</sup> Koentjoroningrat, *Metode- metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 81.

direncanakan sebelumnya. Jadi kalau sasaran atau tujuan itu tidak selesai dengan tepat waktu yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah suatu hasil yang dicapai dalam melaksanakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan. Disini berarti efektivitas dapat diartikan sebagai hasil yang di capai (*output*) atau perbandingan antara output dengan tujuan, apabila suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan atau mendekati tujuannya maka kegiatan itu dapat dikatakan efektif.

Efektivitas dalam penelitian ini adalah suatu hasil yang dicapai dalam proses pembangunan desa yang mampu mendekati bahkan mencapai sasaran, tujuan pembangunan desa dalam bidang sosial ekonomi masyarakat.

#### b. Pembangunan desa

Pembangunan mempunyai arti sebagai suatu proses dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatkan peran serta masyarakat banyak sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan perubahan- perubahan sosial/ struktur sosial yang mendasar maupun pertumbuhan yang dipercepat tetapi terkendali dalam ruang lingkup keadilan sosial demi kemajuan dan kualitas hidup dan peningkatan harkat martabat manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Suwarno Handaya Ningrat, *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1986, hal. 16

Sedangkan pendapat I Nyoman. B pembangunan tidak lain mempunyai pengertian suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma- norma tertentu. Perubahan untuk menuju keadaan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya.<sup>12</sup>

Selanjutnya T. R. Batten berpendapat bahwa :

“Pembangunan itu suatu proses dimana orang atau masyarakat desa mendiskusikan dan mengerjakan sesuatu secara bersama- sama untuk memenuhi keinginan tersebut.”<sup>13</sup>

Sehubungan dengan pendapat di atas, Sondang P Siagian mengemukakan bahwa :

“Pembangunan adalah usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana, dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.”<sup>14</sup>

Meskipun pengertian pembangunan yang diungkapkan oleh para ahli sangat bervariasi, tetapi pada dasarnya sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar atau sengaja oleh manusia dan berorientasi pada peningkatan atau perubahan ke arah kemajuan oleh manusia dalam berbagai aspek secara berkesinambungan, terarah dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang penyusun maksud dalam penelitian ini adalah kemajuan di bidang sosial ekonomi.

Pengertian desa menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 1999, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul

<sup>12</sup> I Nyoman. B, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 67

<sup>13</sup> TR Batten dan Suryadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, alumni Bandung, 1989, hal. 42.

<sup>14</sup> S. P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1970, hal. 2

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.<sup>15</sup>

Sedangkan pengertian desa menurut Undang- Undang No. 5 tahun 1979 menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RI.<sup>16</sup>

Menurut I Nyoman Barata mengemukakan tentang desa sebagai berikut :Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah sah “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan badan wilayah yang melingkupinya.<sup>17</sup>

Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah maka UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa sudah tidak berlaku lagi.

Untuk mengartikan desa juga dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu :

#### a. Pendekatan Sosiologis

Desa adalah sekelompok masyarakat yang terhimpun dalam kaitan yang erat, saling mengenal dengan baik satu sama lain dan hidup dalam kaitan tradisi yang mereka hormati.

#### b. Pendekatan Antropologis

<sup>15</sup> Undang- Undang Otonomi Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Dearah Tahun 2000

<sup>16</sup> Undang- Undang Otonomi Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Dearah Tahun 2000

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Kesatuan hukum yang dimaksud adalah mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan mengatur yang berkaitan dengan kepentingan penduduk atau anggota di wilayahnya.

### c. Pendekatan Politik Administratif

Desa adalah organisasi kekuasaan dimana kesatuan masyarakat hukum yang memiliki pemimpin tertentu dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kehidupan mereka sendiri secara administratif sebagai bagian terendah dalam organisasi negara. Organisasi kekuasaan adalah lembaga yang mereka himpun dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan terikat di dalam satu kesatuan hukum yang memiliki kemampuan untuk memaksa anggota untuk mengikuti lembaga.

Selanjutnya ada pendapat yang menyatakan bahwa desa adalah organisasi total kehidupan masyarakat (sosial) dalam suatu areal yang terbatas.<sup>18</sup> Beberapa pendapat tersebut, mencerminkan bahwa pengertian desa dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang, karena pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling terkait satu sama lain.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud desa adalah suatu wilayah dimana bertempat tinggalnya suatu masyarakat yang

---

<sup>18</sup> William Ogburn, dalam Kharuddin H, *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi*

merupakan kesatuan masyarakat hukum, bekerjasama dalam satu pemerintahan dan membangun hubungan gotong-royong yang erat dalam pola interaksi sosial yang erat dan wilayah tersebut memiliki kekayaan alam yang besar namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai sebagai pengelola.

Dalam konteks suatu negara, pembangunan itu dilakukan pada berbagai tingkat baik pusat, daerah, kota, desa sebagai tingkat yang terendah. Desa menjadi penting kedudukannya dalam wacana pembangunan nasional, karena pada tingkat inilah hidup sebagian penduduk dengan berbagai aspek keterbelakangan, oleh karena itu pembangunan di tingkat desa menjadi prioritas dalam setiap public policy yang direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah.

Pembangunan desa memerlukan suatu organisasi atau pemerintahan desa yang berfungsi melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi berbagai bidang kemasyarakatan, fisik desa yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat desa. Agar lebih jelasnya, ada beberapa pendapat ahli tentang pembangunan desa, seperti yang dikemukakan oleh Inayatullah sebagai berikut :

“Pembangunan desa merupakan suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yang disertai meningkatnya taraf hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut.”<sup>19</sup>

Di samping itu pembangunan desa menurut Sutarjo adalah :

“Pembangunan desa merupakan sebulur rangkaian usaha yang dilaksanakan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan desa.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Inayatullah, dalam Peter Hagul, *Pembangunan desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, 1985, Hal. 11.

Seluruh rangkaian usaha tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan desa tersebut diperlukan dukungan berupa penyediaan sarana, prasarana yang menunjang, tenaga pengarah baik formal maupun informal dan faktor lain.

Seperti yang dikemukakan oleh R. Bintarto bahwa ciri utama pembangunan desa baik yang dilaksanakan secara langsung dalam bentuk swadaya murni dan swadaya gotong-royong sasaran utamanya adalah menjadikan desa- desa di seluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan desa swasembada yaitu desa- desa yang maju dan berkembang, dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang memadai.<sup>21</sup>

Pada hakekatnya pembangunan desa merupakan kewajiban bersama antara pemerintah bersama- sama dengan masyarakat. Pemerintah memberi petunjuk, bimbingan pengarahan dan pengawasan agar pelaksanaan pembangunan menjadi terarah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah.

Disamping itu pembangunan desa memiliki ciri- ciri tersendiri yang perlu dicermati, antara lain :<sup>22</sup>

1. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa yang bersangkutan dalam proses pembangunan proyek. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat pembangunan itu bukanlah pembangunan desa.

---

<sup>20</sup> Sunarjono, *Buku Pegangan Kader Pembangunan Desa*, Pustaka Masa, Jakarta, 1967, hal 7.

<sup>21</sup> R. Bintarto, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 25.

2. Proses pembangunan desa adalah usaha berencana dan diorganisir guna membantu anggota masyarakat untuk memperoleh sikap, ketrampilan dan pengertian yang diperlukan untuk mampu berpartisipasi aktif.
3. Membangun desa berarti membangun peran serta.
4. Karena membangun desa juga menyangkut pembangunan masyarakat berarti membangun swadaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ciri- ciri ini perlu dicermati oleh berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan atau pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan agar efektivitas pembangunan dapat tercapai.

Dari uraian tersebut dan beberapa pendapat ahli tentang pembangunan desa, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap terpadu dan meningkatkan iklim swadaya gotong- royong masyarakat dan menghasilkan suatu perubahan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sistematis dan terarah

..... dan usaha pembangunan secara sebagai usaha

Kondisi sejahtera rakyat pedesaan digambarkan dalam berapa kategori desa yaitu, desa swadaya, desa swakarsa, desa swakarya dan menuju desa swasembada. Pengelompokan desa kedalam beberapa kategori berdasarkan tingkat perkembangan desa adalah untuk mempermudah penanganan pembangunan desa, karena dengan adanya kategori tersebut secara mudah dapat diketahui permasalahan konkrit atau kekurangan yang perlu ditangani sehingga pembangunan desa dapat lebih efektif. Pengertian tentang tiga kategori tingkat perkembangan desa secara garis besar adalah :

1. Desa Swadaya, adalah desa tradisional dimana adat istiadat mengikat, hubungan antara individu sangat erat, pengawasan sosial didasarkan pada garis keluarga. Mata pencaharian penduduk homogen, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Teknologi masih sederhana, tingkat produktifitas rendah disertai keadaan prasarana yang masih kurang.
2. Desa Swakarsa, adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, dimana adat istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh yang mulai mendinamisir dari luar sudah mulai masuk desa, yang mengakibatkan perubahan sikap dan cara berfikir. Bertambahnya lapangan pekerjaan, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang disamping sektor primer, juga sekunder. Produktifitas mulai naik atau meningkat diimbangi dengan meningkatnya prasarana desa.
3. Desa Swasembada, adalah desa yang setingkat lagi lebih maju dari desa

.....

Hubungan antar manusia bersifat rasional, mata pencaharian penduduk sudah beraneka ragam baik primer, sekunder, maupun tersier. Teknologi baru sudah benar- benar dimanfaatkan, sehingga produktifitas meningkat diimbangi dengan prasarana desa yang memadai.

Pembangunan desa adalah bagian integral dari pembangunan nasional, yang dilaksanakan dalam pembangunan manusia seutuhnya, suatu gerakan pembangunan yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat desa, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memantapkan ketahanan masyarakat desa di segala bidang agar terwujud ketahanan nasional yang sehat dan kuat. Oleh karena itu pembangunan desa diarahkan untuk meletakkan dasar- dasar sosial ekonomi yang kuat, sebagai landasan pembangunan nasional.

### c. Efektivitas Pembangunan Desa.

Berdasarkan pendapat yang telah terurai di atas tentang pengertian efektivitas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam kaitannya dengan pembangunan desa, kiranya dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dapat berhasil apabila pembangunan proyek- proyek yang tercakup di dalamnya, baik itu dalam pembangunan fisik maupun non fisik tersebut tercapai.

Dengan demikian efektivitas dari pembangunan desa mempunyai maksud sebagai sasaran atau tujuan dari pembangunan itu sendiri, yang mana dalam

.....



sosial menurut Pitirim A. Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas- kelas secara bertingkat. Di mana perwujudannya adalah lapisan- lapisan atau kelas- kelas tinggi, sedang, atau rendah.<sup>27</sup>

Terjadinya lapisan- lapisan dalam masyarakat ada beberapa sebab antara lain :

- Tak ada keseimbangan dalam pembagian hak- hak dan kewajiban.
- Kurang terpenuhinya kebutuhan daripada manusia.
- Adanya kekuatan- kekuatan sosial dan pengaruhnya di antara anggota masyarakat.

Kecenderungan untuk hidup bersama akan dapat lebih terjamin apabila kesejahteraan dalam masyarakat merata karena pemerataan kebutuhan akan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu juga dalam kaitannya dengan pembangunan desa perlu pula pembangunan prasarana sosial untuk masyarakat dapat merasa nyaman dalam hidup bersama dan dapat melakukan kegiatan bersama dalam masyarakat.

Dalam pembangunan desa yang menyangkut pembangunan prasarana sosial desa, meliputi :

- Balai Desa yang digunakan untuk musyawarah mufakat desa.
- Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan
- Bak sampah guna meningkatkan kebersihan lingkungan
- Pengadaan listrik
- Sarana pendidikan, ibadah, dan lain- lain.

Kalau kita lihat dari terjadinya lapisan- lapisan dalam masyarakat, ada tiga bentuk pokok dari stratifikasi yang dikelompokkan atas bidang ekonomi, politik dan pada jabatan- jabatan tertentu dalam masyarakat. Ketiga bentuk tersebut sangat erat kaitannya satu sama lain, dimana terjadi saling mempengaruhi.

Keadaan ekonomi mempengaruhi pada tingkat sosial seseorang, oleh karena itu perlunya pembangunan di bidang- bidang sosial dan ekonomi agar masyarakat desa tidak lagi mengalami kesenjangan dalam kehidupannya. Dengan kemajuan sosial dalam masyarakat seperti misalnya kemajuan dalam pendidikan akan membuka pikiran masyarakat pada dunia luar dan tidak lagi ada kesenjangan walaupun stratifikasi dalam masyarakat tidak dapat dihilangkan. Pembangunan sosial masyarakat secara tidak langsung dapat digambarkan melalui kesejahteraan masyarakat dengan komponen- komponen diantaranya adalah :<sup>28</sup>

- a. penduduk, Keluarga Berencana, dan migrasi.
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan, gizi, dan pengeluaran/ konsumsi rumah tangga
- d. Angkatan kerja
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat
- f. Perumahan dan lingkungan hidup

---

<sup>28</sup>Hendra Esmara, *op. cit.*, hal. 424.

Perlu pula di sini diuraikan tentang pengertian ekonomi adalah merupakan pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas- asas penghasilan, produksi, pembagian (distribusi) dan pemakaian barang- barang serta kekayaan.<sup>29</sup>

Dalam kenyataan hidup sehari- hari keadaan ekonomi akan berbeda- beda. Penghasilan yang cukup besar akan membuat atau memudahkan dalam memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan, sebaliknya penghasilan yang rendah atau kecil akan mengakibatkan mereka harus mempertahankan hidupnya dengan mengorbankan kepentingan lainnya yang tidak bisa dipenuhi.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa status ekonomi masyarakat merupakan fungsi dari pekerjaan, pendapatan dan kekayaan. Di pedesaan banyak penduduk yang bekerja pada lebih dari satu pekerjaan. Hal ini dikarenakan dari pekerjaan utama belum cukup untuk membiayai hidup keluarga, terutama bagi rumah tangga golongan miskin atau yang tidak menguasai sumber non tenaga.

Bagi penduduk yang menguasai sumber non tenaga yang sangat kecil atau yang tidak menguasai sama sekali hanya mampu berburuh tani merupakan pekerjaan yang utama, dan kemudian sebagian pekerjaan kedua adalah kerajinan rakyat atau pekerjaan non pertanian yang lain.

Produktivitas, pendapatan, dan pekerjaan masyarakat merupakan beberapa hal yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

---

<sup>29</sup> ... ..

#### a. Produktivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia produktivitas adalah jumlah hasil yang dicapai oleh seseorang pekerja atau unit faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa produktivitas pembangunan adalah hasil yang dicapai melalui pembangunan desa dalam suatu periode tertentu.

Pada umumnya kita berpendapat bahwa produktivitas diukur dari segi banyaknya hasil, tetapi ada pula yang mengukur dengan standart dasar dari hasil pelaksanaan yang dicapai terhadap standart kerja yang sudah mapan.

#### b. Pekerjaan

Pekerjaan akan menentukan status ekonomi karena dengan bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Sehubungan dengan pekerjaan Umar Hamalik, memberikan penjelasan secara lebih mendalam bahwa bekerja merupakan kebutuhan dan sekaligus keharusan bagi setiap individu, warga masyarakat dan warga negara. Dengan demikian ia akan mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan wajar dalam arti ekonomi. Karena itu hasil pekerjaan bukan hanya memberikan kepuasan dalam segi jasmani tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan bagi setiap individu dalam kehidupannya.<sup>30</sup>

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pekerjaan adalah setiap kegiatan atas usaha manusia untuk mendapatkan imbalan atau upah berupa barang atau jasa sehingga dapat terpenuhinya kegiatan hidupnya.

Dalam perkembangan selanjutnya timbul bermacam- macam jenis pekerjaan seperti disebutkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bahwa jenis pekerjaan itu adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang bekerja atau pernah bekerja selama seminggu.

Dari berbagai klasifikasi pekerjaan tersebut orang akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan ketrampilannya yang dimilikinya. Dalam masyarakat tumbuh kecenderungan bahwa orang yang bekerja akan lebih terhormat dimata masyarakat, artinya lebih dihargai secara sosial dan ekonomi.

Jadi untuk menentukan status ekonomi masyarakat dilihat dari pekerjaan, penyusun memberi batasan sebagai berikut :

- Pekerjaan yang berstatus tinggi yaitu tenaga ahli dan ahli jenis, pemimpin dan tata kelaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta.
- Pekerjaan yang berstatus sedang yaitu pekerjaan dibidang penjualan dan jasa.
- Pekerjaan yang berstatus rendah yaitu petani dan operator alat angkut/ bengkel.

Dan di desa kebanyakan pekerja yang berstatus rendah karena sebagian

### c. Pendapatan

Pendapatan dan kekayaan juga akan mempengaruhi status ekonomi seseorang, terutama akan ditemui dalam masyarakat yang materialistis dan tradisional yang menghargai status ekonomi yang tinggi terhadap kekayaan.

Selanjutnya Penny dan Ginting mengungkapkan bahwa :

“Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang, baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri yang dinilai dengan uang dalam jangka waktu tertentu yang kemudian dapat digunakan oleh orang yang bersangkutan.”<sup>31</sup>

Batasan tersebut dibuat untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengalami kemajuan dari tahun ketahun. Jadi jelas bahwa peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator efektifitas pembangunan desa.

### 3. Efektivitas pembangunan desa dalam bidang sosial ekonomi

Efektivitas pembangunan desa mempunyai maksud sebagai sarana atau tujuan dari pembangunan itu sendiri, yang mana dalam pembangunan desa pada penelitian ini menyangkut pembangunan sosial ekonomi desa yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2000-2003 di desa Jebengsari, kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Jadi dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan adalah efek atau hasil dari suatu proses yang direncanakan, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang secara

---

<sup>31</sup> Penny dan Ginting, *Op. Cit.*, hal. 1005-1010

langsung nampak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan melibatkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan bersama. Pembangunan dalam bidang ekonomi dalam upaya peningkatan produksi melalui program perkreditan / bantuan untuk modal usaha yang diberikan langsung oleh pemerintah.

Dengan demikian penyusun menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pembangunan desa dalam bidang sosial ekonomi adalah hasil dari serangkaian usaha oleh masyarakat desa dan pemerintah yang dilaksanakan di desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperbesar kesejahteraan desa yang meliputi aspek sosial ekonomi yaitu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, perumahan dan pemukiman dan peningkatan usaha dan pendapatan masyarakat yang dilaksanakan bertahap, terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

#### **E. Definisi Konsepsional**

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman.

1. Efektivitas adalah suatu hasil yang dicapai dalam proses pembangunan desa yang mampu mendekati bahkan mencapai sasaran / tujuan pembangunan desa.

2. Pembangunan desa adalah rangkaian usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Bidang sosial ekonomi adalah hasil dari serangkaian usaha oleh masyarakat dan pemerintah yang dilaksanakan di desa dengan tujuan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan desa yang meliputi aspek sosial ekonomi (yaitu bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, perumahan dan pemukiman dan peningkatan usaha dan pendapatan masyarakat) yang dilaksanakan secara bertahap, terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

#### **F. Definisi Operasional**

Adalah bagaimana cara mengukur atau melihat suatu variabel sehingga penelitian ini akan benar-benar terarah dengan baik dan jelas. Adapun definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini diukur melalui indikator-indikator dari efektivitas pembangunan desa di bidang sosial ekonomi dalam kurun waktu 2000- 2003 di desa Jebengsari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- Dalam Bidang Sosial :

1. Peningkatan pendidikan masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat.
3. Peningkatan jumlah akseptor KB
4. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat

- Dalam Bidang Ekonomi

1. Peningkatan produktivitas/ usaha serta pendapatan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Seperti pada umumnya suatu kegiatan penelitian, pada penelitian tentang efektivitas pembangunan desa dalam bidang sosial ekonomi ini, menggunakan metode- metode sehingga kegiatan penelitian ini akan lebih dikatakan ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada penelitian di lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan serangkaian fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit- unit penelitian lapangan secara jelas dan terperinci.

2. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi

Adalah studi yang dilakukan dengan pengamatan dan pendataan langsung dari lokasi penelitian secara disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial. Dalam hal ini yang penulis amati secara langsung adalah Sekolah Dasar Jebengsari, pelaksanaan program Kejar Paket B, kegiatan Posyandu, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan desa.

- Dalam Bidang Ekonomi

1. Peningkatan produktivitas/ usaha serta pendapatan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Seperti pada umumnya suatu kegiatan penelitian, pada penelitian tentang efektivitas pembangunan desa dalam bidang sosial ekonomi ini, menggunakan metode- metode sehingga kegiatan penelitian ini akan lebih dikatakan ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada penelitian di lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan serangkaian fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit- unit penelitian lapangan secara jelas dan terperinci.

2. Teknik Pengumpulan data

- a. Observasi

Adalah studi yang dilakukan dengan pengamatan dan pendataan langsung dari lokasi penelitian secara disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial. Dalam hal ini yang penulis amati secara langsung adalah Sekolah Dasar Jebengsari, pelaksanaan program Kejar Paket B, kegiatan Posyandu,

b. Interview / wawancara

Secara langsung melakukan tanya jawab untuk memperoleh data dengan aparat desa setempat dan lembaga- lembaga yang terkait dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat diantaranya adalah Kepala desa, Kepala Sekolah Desa Jebengsari, Pembina KPSM, Ketua KBU, Kader PHC, Bidan Desa dan sebagian masyarakat.

c. Dokumentasi

Adalah pencarian data yang dilakukan dengan membaca dokumen / arsip yang sesuai dengan permasalahan. Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan adalah monografi desa tahun 2000- 2003, arsip Kejar Paket B, Agenda Posyandu dan Polindes, Laporan kegiatan PHC, laporan kegiatan KPSM.

3. Unit Analisis

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah ; Sarana Pendidikan Desa Jebengsari, Kejar Paket B, Polindes, Posyandu, KPSM (Kegiatan Pembelajaran Swadaya Masyarakat) dan KBU(Kegiatan Belajar Usaha).

#### 4. Jenis Data

##### i. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui interview dan observasi daerah penelitian.

##### ii. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dengan mempelajari catatan, sumber- sumber dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya melakukan analisa data. Analisa data disini bersifat kualitatif. Adapun analisa data kualitatif menurut Koentjoroningrat adalah sebagai berikut :

“Analisa data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan hanya sedikit-sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus- kasus, sehingga tidak disusun dalam suatu struktur klasifikator”.<sup>32</sup>